

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam bagian pendahuluan ini, penulis akan memaparkan latar belakang permasalahan yang digunakan untuk menyusun rumusan permasalahan, kemudian teori dan metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut secara hipotetik, serta tujuan dan lingkup penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Permasalahan

Kebangkitan politik populisme sudah mulai terlihat sejak 15 tahun terakhir di beberapa negara tidak terkecuali Eropa. Dua peristiwa penting di tahun 2016 menunjukkan gelombang gerakan populisme. Peristiwa tersebut adalah BREXIT vote dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (Jaaskelainen, 2019). Peristiwa BREXIT vote adalah suatu peristiwa dimana mayoritas masyarakat Inggris memutuskan untuk keluar dari keteranggotaan Uni Eropa. Gerakan politik populis banyak menarik perhatian masyarakat dikarenakan paham ini mengandung misi ingin menyejahterakan kehidupan rakyat serta mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Gerakan populis ini tidak hanya terikat pada munculnya figur tertentu sebagai tokoh populis. Namun, menjadi suatu bentuk gerakan transnasional yang menjadi tren saat ini. Tren global ini diwujudkan dalam bentuk protes dan mobilisasi massa (Darmawan, 2017, hal. 1).

Uni Eropa merupakan persatuan antara 28 negara di Eropa dalam bidang ekonomi dan politik. Ada berbagai tujuan dasar dalam pembentukan Uni Eropa yaitu, berperan sebagai institusi yang dapat memerintah secara demokratis dan juga terbuka serta

menegakkan nilai kebebasan, kemanusiaan, keadilan, dan persamaan sehingga dapat tercipta kondisi masyarakat Eropa yang sejahtera, damai, dan stabil (Saviar, 2017, hal. 2).

Inggris mulai menyampaikan permintaan untuk dapat bergabung menjadi anggota Uni Eropa untuk pertama kalinya pada tahun 1961. Namun dalam permintaan tersebut Inggris justru mendapatkan suatu pertentangan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa, salah satu negara yang menentang Inggris untuk bergabung adalah Prancis. Pada tahun 1963 akhirnya Inggris mencoba untuk mendaftarkan dirinya lagi menjadi bagian dari anggota Uni Eropa akan tetapi kembali mengalami penolakan oleh presiden Prancis yang kala itu dijabat oleh Charles de Gaule. Charles de Gaule mengungkapkan alasan dibalik penolakan keanggotaan Inggris menjadi anggota Uni Eropa untuk yang kedua kalinya adalah karena kekhawatiran Prancis terhadap Inggris yang nantinya akan menjadi suatu musuh dari dalam yang dapat mengganggu bahkan merusak integrasi Uni Eropa karena, adanya suatu koneksi yang sama yang dimiliki antara Inggris dan Amerika Serikat. Hingga pada saat lengsernya Charles de Gaule dari jabatannya sebagai presiden Prancis, Inggris kembali mengajukan permohonannya untuk menjadi bagian dari anggota Uni Eropa tahun 1967 yang kala itu Inggris dipimpin oleh seorang politisi Partai Konservatif Edward Heath. Setelah melalui usaha serta kerja keras yang panjang akhirnya Inggris mendapatkan kabar yang gembira, permintaan yang diajukan oleh Inggris dapat disetujui hingga pada akhirnya Inggris dan juga Denmark serta Irlandia dapat menjadi anggota Uni Eropa secara resmi pada 1 Januari 1973 (Rahmat, 2018).

Referendum keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa bukanlah hal yang biasa lantaran isu ini sering kali dijadikan bahan kampanye oleh partai – partai yang ada di Inggris. Inggris telah mengadakan referendum tentang keanggotaannya dalam Uni Eropa

(Kultsum & Wiyanarti, 2018, hal. 164). Namun, pada tanggal 23 Juni 2016 kembali dilaksanakan referendum untuk yang kedua dan hasilnya Inggris menginginkan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa (Mangkuto, 2018).

Faktor penghambat yang utama bagi Uni Eropa adalah suatu krisis yang berkaitan dan seringkali dialami oleh Uni Eropa mulai dari terorisme, euroskeptis diantara negara – negara Uni Eropa, permasalahan perubahan iklim, ketergantungan energi Rusia, ultra nasionalisme yang ekstrim, penerapan kebijakan Uni Eropa untuk negara – negara anggotanya, keraguan dalam pemberian sanksi oleh Uni Eropa hingga krisis dan permasalahan – permasalahan yang datang dari internal Uni Eropa itu Sendiri (Bosoanca, 2019).

Keikutsertaan Inggris sebagai salah satu anggota Uni Eropa dirasakan banyak merugikan pemerintah Inggris terutama dalam hal ekonomi dan sosial. Inggris sebagai negara maju mendapatkan beban yang berat di Uni Eropa karena mayoritas kondisi perekonomian negara-negara anggota Uni Eropa lainnya berada di bawah Inggris (Mulia, 2018). Ekonomi menjadi salah satu hal vital bagi sebuah negara. Inggris merasa telah banyak mendapat kerugaian dari segi ekonomi saat bergabung dengan Uni Eropa. Kerugian yang dirasakan Inggris seperti, *pertama* Inggris diharuskan membayar iuran yang jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan negara-negara anggota lainnya. Pada tahun 2015, Inggris diharuskan membayar iuran sebesar €18,2 Milyar (Ebis, 2016).

Kedua, Inggris harus menetapkan sistem moneter Eropa. Hal ini mengharuskan Inggris untuk membantu negara yang tertinggal agar lebih maju (Rahmansyah, 2016). *Ketiga*, krisis ekonomi Uni Eropa mengancam perekonomian Inggris. Krisis utang yang

melanda Uni Eropa pada akhirnya melanda hampir seluruh negara-negara anggota Uni Eropa bahkan kepada negara yang bukan pengguna mata uang Euro (Pammasena, 2016). Hal inilah yang membuat Inggris kesulitan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya (Mulia, 2018).

Selain kerugian dari aspek ekonomi dan sosial, Inggris juga merasa dirugikan dalam aspek keamanan. Keamanan akan selalu menjadi isu yang penting bagi setiap negara di dunia tidak terkecuali dengan Inggris. Inggris merasakan keamanan negaranya terganggu akibat dari kebijakan Uni Eropa yang memperbolehkan kebebasan imigran. Pada bulan Desember 2016 lalu, tercatat sekitar 596.000 jiwa bermigrasi menuju Inggris dan 323.000 jiwa bermigrasi keluar Inggris sehingga jika dikalkulasikan, maka populasi di Inggris bertambah sebanyak 273.000 jiwa (Pammasena, 2016). Hal ini tentunya menjadikan keamanan di Inggris menjadi terancam karena jumlah imigran yang tidak dapat dikontrol.

Selain kedua aspek di atas, kondisi politik dan pengambilan kebijakan di Inggris juga banyak dipengaruhi oleh Uni Eropa. Sehingga, Inggris sulit untuk memutuskan kebijakannya sendiri. Hasil analisis dari Departemen Kehakiman Federal Jerman menunjukkan bahwa Undang-Undang di Inggris sebanyak 84% berasal dari Uni Eropa bukan dari domestik pemerintahan Inggris (Ichsan, 2013). Uni Eropa memang institusi yang banyak mengeluarkan kebijakan bagi negara-negara anggotanya. Kebijakan yang dikeluarkan diantaranya terkait dengan perdagangan, migrasi, budaya, dll. Dengan banyaknya kebijakan yang diatur oleh Uni Eropa menjadikan Inggris kurang leluasa dalam mengambil kebijakannya sendiri baik dalam ranah domestik maupun internasional. Hal ini dikarenakan Inggris harus mematuhi segala regulasi yang telah ditetapkan Uni

Eropa. Segala kerugian dan keterbatasan kebebasan inilah yang menjadi cikal bakal Inggris ingin keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Gerakan populis yang telah menjadi gerakan transnasional telah masuk ke banyak negara di dunia tidak terkecuali dengan Inggris. Masyarakat dan pemerintah Inggris mulai menyuarakan kebebasan mereka untuk memutuskan kebijakan mereka sendiri sehingga Inggris dapat lebih leluasa dan melakukan deregulasi dari kebijakan yang ditentukan oleh Uni Eropa (Ichsan, 2013).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas pada bagian latar belakang lantas memunculkan suatu pertanyaan besar “*Peran Apakah Yang Dilakukan Oleh Tokoh Gerakan Populisme di Inggris Dalam Kebijakan Britanian Exit?*”

C. Landasan Teoritik

1. Gerakan Politik

Dalam sebuah negara, masyarakat bisa dikatakan sangat memahami betul bagaimana kinerja pemerintah dan pengaruh langsungnya bagi masyarakat. Hal tersebut tidak jarang menimbulkan ketidakpercayaan, kepuasan dan bahkan sampai pada frustrasi masyarakat akan keadaan atau realita yang ada. Terkadang hal-hal seperti itulah yang menyebabkan masyarakat atau suatu golongan tertentu terpancing untuk mengadakan suatu gerakan-gerakan sosial dengan tujuan untuk mencapai kehidupan baru yang lebih baik. Salah satu gerakan masyarakat suatu negara adalah gerakan sosial pada ranah perpolitikan (Shahrin, 2017, p. 1).

Anthony Giddens menyatakan bahwa suatu gerakan sosial adalah sebuah upaya kolektif yang bertujuan untuk mengejar suatu kepentingan bersama dan atau gerakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective action) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan (Putra, 2016, p. 3).

Gerakan sosial politik (Gersospol) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam politik yang memiliki pengertian yang berbeda dengan partai politik maupun kelompok kepentingan. Gerakan sosial-politik merupakan aspek yang cukup dinamis dalam kehidupan perpolitikan yang kerap kali dapat timbul dalam lingkungan masyarakat apapun, terutama dalam masyarakat yang sedang berada dalam transisi ekonomi, sosial dan budaya serta khususnya dalam bidang perpolitikan. Scott menjelaskan bahwa gerakan sosial politik merupakan suatu bentuk pertentangan yang memiliki pola terorganisir, analitis, responsif, berpandangan, memiliki dampak yang revolusioner, serta mempunyai

ide-ide yang bertujuan mendorong maupun meniadakan dominasi itu sendiri (Shahrin, 2017, p. 3).

Berikut ini beberapa gagasan mengenai gerakan sosial politik:

Rudolf Haberle beranggapan bahwa gerakan sosial adalah suatu gerakan bersama yang memiliki visi dan tujuan untuk merubah suatu keadaan yang kacau dan mengkhawatirkan bagi keberlangsungan orang banyak kedalam suatu bentuk institusi kemasyarakatan tertentu.

Blumer beranggapan bahwa gerakan sosial berawal dari adanya suatu kondisi di mana masyarakat merasa tidak terpuaskan serta kecewa terhadap keadaan yang dirasakannya setiap hari. Masyarakat yang merasa kecewa tersebut berusaha secara bersama-sama untuk meraih tatanan kehidupan yang lebih baik.

David. F Aberle beranggapan bahwa gerakan sosial adalah suatu bentuk usaha yang terencana yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan suatu perubahan terhadap pihak yang menekannya.

Ritzer menjelaskan terdapat 5 karakteristik gerakan sosial politik yaitu (Shahrin, 2017, p. 3);

1. Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat yang berupaya untuk memprotes suatu pihak yang mempunyai persyaratan sebagai institusi.
2. Gerakan yang memiliki ruang lingkup yang umum.
3. Gerakan sosial yang sifatnya reformatif, khususnya pada bidang politik.
4. Gerakan yang revolusioner yang bertujuan melakukan transformasi meluputi segenap anggota masyarakat.

5. Memiliki tujuan untuk menentang adanya suatu institusi dalam bidang sosial maupun politik yang memaksakan suatu keinginan.

2. Populisme

Menurut sejarah awal mula adanya suatu fenomena populisme yang pertama kali berawal dari Amerika Serikat dengan adanya Farmer's Alliance (Aliansi Petani) serta People's Party (Partai Rakyat), ada pula di Russia dengan adanya suatu faksi Narodniki dengan beranggotakan sekumpulan para cendekiawan yang memiliki tujuan untuk menjadikan petani Rusia serta masyarakat pedesaan sebagai contoh negara (Rusia) secara luas. Pada awalnya kegiatan-kegiatan yang berhaluan populis kerap kali berhubungan dengan petani sehingga tidak jarang pula disejajarkan dengan adanya gerakan agraria, gerakan revolusi reaksioner, serta faksi terbelakang pada jaman modernis. Di Amerika sendiri, suatu fenomena populisme masih sangatlah populer, karena mereka selalu berusaha untuk memanipulasi kalangan-kalangan yang merasa gagal serta terasingkan untuk ikut berperan pada suatu arena perpolitik. Populisme yang terjadi di Amerika Latin menjadi salah satu hal yang mempengaruhi popularnya fenomena populisme karena mereka selalu menekankan pada inkulsiivitas serta kesetaraan yang terjadi pada beberapa wilayah yang dianggap terbelakang dalam bidang ekonomi (Hikam, 2019).

Populisme yaitu merupakan suatu pandangan politik yang menempatkan antara masyarakat dengan para elit politik yang korup sebagai pihak yang saling bersebrangan dan menempatkan para elit politik yang korup sebagai pihak yang antagonis dalam perpolitikan serta melihat bahwa politik adalah bentuk ekspresi dari keinginan umum masyarakat kebanyakan (Cas Mudde dalam Perdana, 2017, hal. 2). Sedangkan Populisme

menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil¹.

Populisme adalah tentang politik non-liberal karena bertentangan dengan setiap prinsip demokrasi liberal artinya: demokrasi liberal tentang toleransi, sedangkan populisme tentang penghukuman; demokrasi liberal tentang melindungi hak-hak minoritas terhadap tirani mayoritas, sedangkan populisme tentang kekuatan rakyat (didefinisikan oleh beberapa ciri identitas 'umum'); demokrasi liberal bersifat elitis, sedangkan populisme bersifat antielitis; demokrasi liberal adalah tentang politik negosiasi dan pembangunan konsensus, sedangkan dalam populisme adalah tentang 'adil' politik dan 'adil' bisa saja salah dalam pola pikir populis (Luís de Sousa, 2010).

Dikutip dari (Wiradi, 2013) Populisme memiliki banyak definisi beragam dari para ahli antara lain:

1. Populisme adalah “Kepercayaan bahwa mayoritas opini rakyat dikontrol atau dicek oleh minoritas elit” (Harry Lazer, 1967).
2. Populisme adalah “Kredo atau gerakan yang didasarkan atas premis utama bahwa ‘nilai moral’ yang paling baik itu terletak pada rakyat sederhana yang merupakan mayoritas besar, dan pada tradisi kolektif mereka” (Peter wiles, 1967).
3. Populisme menyatakan bahwa kehendak rakyat itu sendiri merupakan yang tertinggi di atas semua standar yang lain” (Edward Shils, 1956)

Ada pula beberapa pemikiran lain yang melihat populisme sebagai suatu ekspresi politik yang memiliki beberapa element, antara lain:

¹ Kemdikbud. (t.thn.). *KBBI Daring*. Dipetik Oktober 12, 2019, dari kbbi.kemdikbud.go.id:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/populisme>

1. Anti kemapanan, dalam arti mewakili ekspresi kelompok yang merasa termarjinalkan.
2. Adanya otoritas pemimpin, baik melalui kharisma atau figur personal maupun pesan yang bersifat apokaliptik
3. Memiliki suatu perasaan in-group yang bisa dikatakan kuat, yang dalam banyak hal ditunjukkan dalam sentimen ‘kita vs mereka’ – garis pembatas bisa berdasarkan kelas atau status ekonomi (seperti di Thailand), penduduk vs imigran, bahkan ras dan agama (Perdana, 2017, hal. 2).

Menurut Airlangga Pribadi² dalam artikelnya yang telah terinspirasi oleh teoritisasi atau pemikiran Marxis asal Argentina yang bernama Ernesto Laclau pada bukunya yang berjudul *Politics and Ideology in Marxist Theory*, dalam karyanya tersebut ia mengulas tentang istilah populisme berdasarkan kerangka berfikir Marxis Gramscian. Berdasarkan gagasan serta kerangka berfikir Laclau telah menggolongkan bahwa populisme bisa dikatakan kedalam suatu aliran politik multi maupun supra-kelas yang muncul dari lemahnya kekuatan politik yang mendominasi, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk lahirnya struktur perpolitikan yang baru untuk gerakan politik yang mendasar yang nantinya akan dikendalikan oleh tokoh yang kharismatik untuk membawa serta menyampaikan dialog ekstrem yang anti-kemapanan. Populisme bisa dikatakan bukanlah suatu ideologi politik yang memiliki kerangka kaidah yang kuat ataupun jelas. Hal ini didasarkan pada tindakan dari gerakan politik populisme yang dapat tersampaikan menjadi bagian dari politik kiri, tengah ataupun kanan. Hal ini bergantung pada

²Airlangga Pribadi adalah Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

perbandingan tingkatan ataupun susunan kelas yang ada dalam arena perpolitikan yang dimiliki oleh suatu negara (Pribadi, 2016).

Mengutip dari Mudde dan telah dikutip ulang oleh Beby Pane dalam Balairung Press mengatakan bahwa di kalangan para sekelompok populis akan lahir atau muncul seorang tokoh karismatik yang memimpinya. Populisme kerap kali akan dipimpin oleh suatu figure yang kuat di mana setiap tindakan serta ucapan yang dilontarkannya akan selalu menggambarkan bahwa dirinya adalah vox populi atau suara dari masyarakat banyak. Dirinya akan selalau memperlihatkan bahwa dia adalah gambaran dari masyarakat itu sendiri. Bersuara seolah mewakili suara dari mayoritas masyarakat serta berusaha untuk mewujudkan keinginan dari masyarakat tersebut. Suatu figur yang berhasil mendapatkan hati masyarakat dan dianggap karismatik serta kuat oleh masyarakat akan sangat mudah dalam mengatur serta membawa masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hal tersebutlah yang menciptakan ketergantungan antara populisme terhadap pemimpinya (Pane, 2018).

Populisme terkadang bisa dikatakan sebagai suatu aliran politik yang jelas dengan memiliki tujuan politik yang jelas, akan tetapi sebagai suatu metode politik yang bisa muncul pada berbagai fenomena perpolitikan yang berbeda. Populisme bisa bermanifestasi menjadi beberapa bentuk gambaran fasisme Mussolini di Italia, Nazi di Jerman, serta oleh kekuatan politik Fasis Jean Marie Le Pen di Prancis, maupun gerakan politik yang berhaluan radikal kiri seperti Fidel Castro di Kuba ataupun kepemimpinan revolusi Bolivarian Hugo Chavez di Venezuela yang menyatukan populisme ke dalam suatu bentuk ungkapan maupun ideologi politiknya sebagai suatu metode politik. Para tokoh tersebut sudah menggunakan contoh dari mobilisasi perpolitikan yang massif, dengan memanfaatkan tradisi populis yang sudah ada di dasarnya serta diarahkan oleh suatu

tokoh yang kharismatik dengan menggunakan komunikasi perpolitikan yang meyakinkan serta tindakan tersebut kerap kali muncul dari melemahnya dominasi politik yang menghegemoni (Pribadi, 2016).

Kekhawatiran-kekhawatiran yang tengah terjadi dijadikan sebagai bahan untuk menarik simpati dan menggabungkan dukungan masyarakat oleh kalangan populis. Setelah masyarakat bergabung menjadi satu untuk mendukung, maka selanjutnya masyarakat dipimpin untuk mengatasi musuh bersama. Biasanya musuh bersama yang digambarkan adalah mereka para kalangan partai politik yang elit hingga pemerintahan yang korup. Pengerahan ini sering kali berlangsung sejalan dengan adanya kritik-kritik yang ditujukan kepada musuh bersama tersebut. Pemimpin populis menggerakkan masyarakat untuk mencapai suatu ide-ide politik tertentu. Mobilisasi massa ini biasanya menggunakan media yang bertujaun untuk meningkatkan kesadaran terhadap keresahan yang tengah dibawa oleh pemimpin populis (Pane, 2018).

Sementara ketika suatu gerakan politik populisme bisa berkembang sebagai suatu gerakan radikal demokratik yang membebaskan jika ada saat dalam perkembangannya terinkorporasi pada kepentingan kekuatan sosial kaum tertindas dan terkorespondensi dengan gerakan-gerakan sosial emansipatoris³. Maka saat berada pada kondisi politik yang krisis suatu gerakan populisme dapat berubah menjadi sebuah gerakan revolusi demokratik yang menyuarakan desakan-desakan dari suatu tradisi berciri khas kerakyatan menjadi suatu gerakan pembebasan (Pribadi, 2016).

³ Melibatkan warga negara atau masyarakat dalam dialog aktif untuk menetapkan tujuan Bersama mengenai perubahan yang diperlukan dan berkontribusi terhadap masyarakat yang berkelanjutan secara keseluruhan.

Kedua teori yang telah disebutkan dapat kita gunakan untuk menjelaskan tentang fenomena yang terjadi dalam keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa pada tahun 2016. Teori *Political Movement* atau teori gerakan politik digunakan untuk menjelaskan pergerakan yang tengah terjadi di kalangan masyarakat Inggris. Sedangkan teori Populisme digunakan untuk menjelaskan bentuk dari fenomena gerakan politik di kalangan masyarakat Inggris. Kedua teori tersebut sangat tepat digunakan untuk menjelaskan serta menjawab pokok masalah yang tengah kita hadapi dan telah disebutkan pada bagian rumusan masalah.

D. Hipotesa

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas maka kita telah mendapatkan kesimpulan awal bahwa:

Berkembangnya gerakan populisme akan selalu beriringan dan sejalan dengan munculnya suatu figure atau tokoh yang karismatik yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih keluar dalam referendum Britanian Exit. Serangkaian tokoh populisme yang berkarisma seperti mulai dari David Cameron, Theresa May, Nigel Farage, hingga Boris Johnson memiliki peran untuk mempengaruhi atau memanipulasi masyarakat untuk mengadakan referendum hingga memilih untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Dengan adanya paham populisme yang dibawa oleh tokoh karismatik yang muncul ditengah masyarakat Inggris akan mendorong masyarakat untuk segera melakukan referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

E. Tujuan penelitian

Secara umum penelitian ini dibuat dengan memiliki suatu tujuan untuk :

1. Menganalisa gerakan populisme yang menyebabkan masyarakat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa
2. Menganalisa timbulnya rasa euroskeptis di kalangan masyarakat Inggris dalam peristiwa BREXIT.
3. Menganalisa pergerakan politik yang dilakukan masyarakat Inggris dalam peristiwa BREXIT.

F. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat terfokus pada masalah yang ingin diteliti maka peneliti telah membatasi penelitian ini pada tahun 2016 dimana pada tahun tersebut masyarakat Inggris telah memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Penelitian ini juga akan membahas tentang tahun – tahun yang masih relevan dengan masalah yang ingin diteliti.

G. Metode Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data-data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan maka penulis menggunakan metode Kepustakaan (*Library Research*). Metode Kepustakaan atau *Library Research* adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi dengan membaca serta mempelajari buku, karya tulis ilmiah, dan juga segala macam tulisan ilmiah yang masih berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat (Hamzah, 2019). Jenis data yang didapatkan oleh penulis juga berupa data sekunder yang didapatkan dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, media cetak, maupun situs internet.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari:

1. BAB I

Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Batasan Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

2. BAB II

Pada BAB II akan dijelaskan sejarah pergerakan dan persebaran populisme di beberapa negara dan Inggris.

3. BAB III

Pada BAB III nantinya akan dijelaskan tentang sejarah bergabungnya Inggris menjadi anggota Uni Eropa.

4. BAB IV

Pada BAB IV nantinya akan menjelaskan tentang Pengaruh Gerakan Populisme di Inggris dalam Referendum Britanian Exit serta menjelaskan lebih lanjut tentang hipotesa awal yang telah didapat.

5. BAB V

Pada BAB V ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis bab-bab sebelumnya mengenai keseluruhan penelitian.